

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUCHAMMAD TEDY SETIAWAN

NPM : 2074201001483

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

MUCHAMMAD TEDY SETIAWAN

NPM : 2074201001483

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
MUCHAMMAD TEDY SETIAWAN

NPM : 2074201001483

Tanggal : 30 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji

Dr. Ronny Winarno, S.H MHum.

Anggota Dewan Penguji

Dwi Budiarti, S.H. MHum.

Sekretaris Penguji

Dr. Istijab, S.H MHum, MPd.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 30 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, SH MHum.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 30 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Istijab, S.H. MHum. MP.d

Dwi Budiarti, S.H. MHum.

ABSTRAK

Dalam konteks kota, migrasi dari pedesaan ke perkotaan sering kali dipandang sebagai jalan menuju peluang ekonomi, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih individualistik dan kurang personal. Hal ini mencerminkan orientasi ekonomi yang lebih fokus pada keuntungan pribadi. Sementara itu, sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), terus berkembang sebagai bagian penting dalam struktur ekonomi, meskipun sering kali menghadapi tantangan perlindungan ekonomi yang kurang dari pemerintah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai, (1) Bagaimana kewajiban pemerintahan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 34 dan 35 Perda Kota Pasuruan No.2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, (2) Apakah tujuan hukum yang hendak dicapai dengan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*), yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Dalam hasil penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pemberdayaan PKL, sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan PKL di Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan teratur serta meningkatkan kesejahteraan PKL melalui pendekatan yang berkelanjutan. Pemberdayaan PKL didasarkan pada Perda Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi usaha, perizinan, dan perlindungan hukum bagi PKL, sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Implementasi pemberdayaan PKL mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan implementasi yang efektif, pemerintah Kota Pasuruan dapat mencapai keseimbangan antara mendukung pengembangan usaha PKL dan menjaga ketertiban umum, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kewajiban, Pemberdayaan, AUPB, dan Pedagang Kaki Lima

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 30 Juli 2024

Penulis



MUCHAMMAD TEDY SETIAWAN

NPM : 2074201001483

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK “

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H MHum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH, MHum selaku Ketua Majelis dan Penguji
4. Pembimbing I Bapak Dr. Istijab, S.H MHum, MPd yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini terwujud.
5. Pembimbing II Ibu Dwi Budiarti, S.H MHum yang senantiasa memberikan bimbingan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan,

6. Dosen Wali Bapak Dr. Mashuri, S.H M.H yang senantiasa memberikan bimbingan, arah, beserta semangat kepada penulis dalam menempuh program studi fakultas hukum universitas Merdeka pasuruan.
7. Ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, selalu memberikan nasihat-nasihat yang menyejukan hati serta tak luput mendoakan serta mendukung setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan harapan penulis.
8. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan dunia pembelajaran terkhususnya pembelajaran ilmu hukum.

Pasuruan, 30 Juli 2024

Penulis,



Muchammad Tedy Setiawan

NPM : 2074201001483

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	14
1. Definisi Pemerintah Daerah	14
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	17
3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah	19
B. Tinjauan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	20
1. Pengertian Asas Umum Pemerintahan yang Baik	20
2. Asas Penyelenggaraan Administrasi dari Pemerintahan yang Baik.....	21
3. Tujuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	24
C. Tinjauan tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	27
1. Definisi Pedagang Kaki Lima	27
2. Bentuk Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	30
3. Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	32

3.1 Pedagang Kaki Lima yang Terakomodir Pasar.....	32
3.2 Pedagang Kaki Lima yang Tidak Terakomodir Pasar	33
3.3 Pedagang Kaki Lima yang Termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Menengah.....	35
4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	42
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEWUJUDKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	
A. Kewajiban pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 34 dan 35 Perda Kota Pasuruan No.2 Tahun 2013.....	49
B. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

